Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 18 Nomor 1, Maret 2024: 1-118
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Dr. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin) 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. (BRIN) 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. (BRIN) 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. (BRIN) 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P. 5. B. Lora Christyanti, S.I.P. 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasioanal)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Farhana Rasdiji, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

6. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH., M.Kn., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Udayana

7. Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

8. Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

9. Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

10. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum., MPA.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai

11. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., CLA.
Politeknik Imigrasi

12. M. Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

13. Anita Herlina, A.Md.IP., S.H., M.A.
The University of Western Australia

14. M. Ali Aranoval
Center for Detention Studies

DAFTAR ISI

1. Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta
(Ambiguity of the Rules of Notary Obligation to Apply the Fingerprints of the Dealing Parties on the Minuta Deed) 1-16
Sri Turatmiyah, Putu Samawati, Sri Handayani1, Efka Firsta
2. Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif *(Passive Vote Buying)* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Criminal Sanctions against the Offenders of Passive Vote Buying in the General Election Administration)..... 17-28
Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej
3. *Indonesian Travel Documents and The ICAO Document 9303: Principles, Security, Technology, and Infrastructure* 29-48
Intan Nurkumalawati, Eva Achjani Zulfa, and Muhammad Syaroni Rofii
4. Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian
(*Strengthening Of Free Visit Visa Policy Through The Role Of The Guarantor: Reviving The Mandatory Of The Immigration Law)*..... 49-64
Jamaruli Manihuruk
5. Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Studi Kasus di Lapas "X"
(Operational Management of Correctional Institution's Security and Order (Kamtib) Based on A Case Study at The Prison "X") 65-86
Cynthia Ayu Windani, Renisa Tandyasraya
6. Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(Validity of Patent Removal Based on The Circular of The Directorate General of Intellectual Property)..... 87-102
Nuzulia Kumala Sari, Galuh Puspaningrum, Saudatus Zahro
7. Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal Bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
(Policy Design Discourse on Mass Clemency for Drug User/Addict Prisoners in Correctional Institution)..... 103-118
Yoga Dwi Putra Permana, Ima Mayasari

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi pertama pada bulan Maret 2024. Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta; Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (*Passiv Vote Buying*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; *Indonesian Travel Documents and The ICAO Document 9303: Principles, Security, Technology, and Infrastructure*; Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian; Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Studi Kasus di Lapas "X"; Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap !makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal.

Volume 18 Nomor 1, Maret 2024

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2578-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ambiguity of the Rules of Notary Obligation to Apply the Fingerprints of the Dealing Parties on the Minuta Deed

Sri Turatmiyah, Putu Samawati, Sri Handayani1, Efka Firsta

The research delves into the ambiguity surrounding Article 16, paragraph (1), letter c of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Profession (UUJN), specifically focusing on the obligation of notaries to affix fingerprints on deed minutes. This ambiguity has led to diverse interpretations among notaries, causing a lack of common understanding in its application. The study aims to investigate the implementation of affixing fingerprints on deed minutes and its legal implications. Employing a normative research method with a qualitative descriptive analysis approach, the study draws on secondary data from legal rules, principles, and doctrines. Additionally, interviews with notaries contribute to the analysis. The research reveals that the affixing of fingerprints varies in practice, with some notaries placing them above the signature, on a separate sheet, or directly in a sentence at the end of the deed minutes. The fingerprints typically include the thumb or any fingers. The research concludes that notaries lack a unanimous opinion on the implementation of affixing fingerprints, as mandated by Article 16, paragraph (1), letter c of the UUJN. Failure to comply with this provision may result in sanctions such as written warnings, temporary dismissal, honorable or dishonorable dismissal, according to Article 16, paragraph (1). The study recommends that the Ministry of Law and Human Rights establish regulations, possibly in the form of Kepmenkumham, specifying mandatory mechanisms for affixing fingerprints on deed minutes for notaries. This would serve as legal protection for notaries and contribute to a standardized practice in accordance with the law.

Keywords: *Fingerprint Urgency; Legal Protection; Notary Public.*

Criminal Sanctions against the Offenders of Passive Vote Buying in the General Election Administration

Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej

Money politics or vote buying in elections has been recurring. Unfortunately, the available electoral criminal provisions are only aimed at the promise, money, or other material providers (active vote buying), while the recievers (passive vote buying) are not. In the short term, this research aims to provide a rule breaking in the absence of provisions regarding passive vote buying. Meanwhile, in the long term, this research aims to provide ideas on penal reform in the absence of provisions. Considering that this research is categorized as normative legal research, the documentation study technique with instruments in the form of written materials was utilized and qualitatively analyzed through statutory, historical, and conceptual approaches. In the short term, the absence of provisions regarding passive vote buying within the current electoral legal framework can be overcome by imposing Article 149 paragraph (2) of the Colonial Criminal Code based on teleological-rational-doctrinary interpretations in the administration of the ongoing 2024 Concurrent Elections. Meanwhile, in the long term, the absence of provisions can be overcome by realizing penal reform in the form of regulation of active and passive vote buying in future election laws (ius constituendum).

Keyword: *Money Politics; Electoral Bribery; Electoral Offenses.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Indonesian Travel Documents and The ICAO Document 9303: Principles, Security, Technology, and Infrastructure

Intan Nurkumalawati, Eva Achjani Zulfa, and Muhammad Syaroni Rofii

The issuance, printing, production, and distribution standards of Indonesian travel documents are considered the international policies of travel documents and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. However, there is a notable gap about the concept and compliance of Indonesian passport issuance referring to the Indonesian Immigration Law No. 6 of 2011 with the ICAO Document 9303, which sets international standards for travel documents, security, and management. This study aimed to investigate the issuance standards of Indonesian travel documents under the ICAO Document 9303 about Travel Documents and the principle/management of stolen and lost travel documents, using qualitative research with document analysis and policy evaluation. The results showed that Indonesian travel documents were yet to fully comply with the ICAO Doc 9303, as the bearer signature was compulsory in the biodata or additional pages. The data on stolen and lost Indonesian passport were also not recorded in the Interpol SLTD (Stolen and Lost Travel Documents) database. As a novelty, the infrastructure of the security, cooperation, and management of SLTD was proposed, as all travel documents were redesigned and equipped with the chip features.

Keywords: *Travel Documents; Passport;The Icao Document 9303; Immigration.*

Strengthening Of Free Visit Visa Policy Through The Role Of The Guarantor: Reviving The Mandatory Of The Immigration Law

Jamaruli Manihuruk

The Free Visit Visa Policy has provided the widest possible access for foreigners to enter the territory of Indonesia. This policy is clearly beneficial from a tourism perspective, but on the other hand, it creates many problems related to state order and security, such as the high number of immigration violations committed by foreigners. Therefore, based on the functions it carries out, the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Immigration is required to further improve its supervisory function over foreigners entering Indonesian territory. One alternative that can be used by the Directorate General of Immigration is to involve the role of a guarantor. The research method used in this paper is research with an empirical juridical approach. This research aims to describe the problems and also provide solutions that can be implemented by the government in overcoming the problems caused by the The Free Visit Visa Policy, namely by providing an optimal role to guarantors. The guarantor in question is the Travel Bureau. This solution is in principle in line with the mandate of the Immigration Law and its derivative regulations. If the government is able to issue this policy, then the government will also be helped in monitoring foreigners. In addition, to boost the selling power of regional tourism in Indonesia, the Guarantor can provide special regional travel packages that can be chosen by foreign tourists. Once the two islands are crossed, not only will it boost the selling power of regional tourism, this policy will also make it easier and more efficient to apply for free visa visits by travel agents.

Keywords: *Free Visit Visa; Guarantor; Travel Agency; Immigration Control.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Operational Management of Correctional Institution's Security and Order (Kamtib) Based on A Case Study at The Prison "X"

Cynthia Ayu Windani, Renisa Tandyasraya

The problem of security and order (Kamtib) in Indonesian correctional institutions, especially in Prison "X" is a big concern. Conflicts between correctional inmates (WBP), overcrowding, and increasing disruption of social security and social security are serious issues that require attention. This research aims to understand and improve security and order strategies, using Prison "X" as a case study. This research uses a qualitative approach, involving direct observation in correctional institutions and interviews with key informants. The aim of the research is to develop practical solutions to improve security and maintain order in the correctional system. By revealing the special challenges faced by Prison "X", this research contributes to efforts to improve security and order operations in correctional institutions based on Prison Incident Management (PIM) by UN as a framework. It is hoped that the research findings will guide future research and deepen understanding regarding effective security measures. Apart from that, it is hoped that the research will become a recommendation for the Directorate General of Corrections to increase its support for correctional institutions in Indonesia.

Keywords: *Disturbance of Security and Order in The Prison; Conflict of Inmates; Conflict Prevention; Prison Incident Management Based on Un's Handbook; Prison Security dnd Order.*

Validity of Patent Removal Based on The Circular of The Directorate General of Intellectual Property

Nuzulia Kumala Sari, Galuh Puspaningrum, Saudatus Zahro

This study analyzes the deletion of PT Jaindo Metal Industries' Patent based on the Circular Letter of Director General of Intellectual Property. This study aims to solve the problem of patent deletion based on circulars due to disharmony between laws and regulations with concrete actions taken by Director General of Intellectual Property. This study will discuss the validity of patent deletion based on the circular letter of Director General of Intellectual Property. This research is a normative research using legal, conceptual, and case approaches. The results of this study show that the legal consequences of Directorate General of Intellectual Property letter related deletion of Patents will have an impact on the loss of all legal protection originally owned by Patent Holders and Licensees. The Circular Letter that is used as the basis for deleting Patents cannot annul laws and regulations because it is included at the level of policy regulations (beleidsregel). In the decision of judicial review, the judge's legal considerations are appropriate and not contrary to the law because late payment of annual fees can still be subject to fines. The circular issued by the Director General of Intellectual Property is not eligible to erase PT Jaindo Metal Industries' Patent so it must be null and void. Therefore, it is necessary to harmonize and update by the government related to the Circular Letter of The Directorate General of Intellectual Property to be in accordance with regulation related to Patents.

Keywords: *Patent; Deletion; Circular.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Policy Design Discourse on Mass Clemency for Drug User/Addict Prisoners in Correctional Institution)

Yoga Dwi Putra Permana, Ima Mayasari

The Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Mahfud MD has given recommendations to President Joko Widodo regarding the discourse of a policy of mass clemency for prisoners of drug cases in Correctional Institution. Mass clemency is allocated to prisoners of drug cases who are only consumers or addicts, not to dealers. A strong reason for the government's policy is to reduce the overcrowded of the population in Correctional Institution, given that narcotics is the dominant case and accounts for more than half of all prisoners in Indonesia. The research in this journal aims to describe the design of a policy of mass clemency discourse for prisoners of drug use/addiction cases. The benefit of this research is to contribute academic literature in policy design and make recommendations to governments. The method used is a post-positivist approach with library/literature/documents study as primary data. Based on the analysis carried out by the researchers obtained the result that the design of the policy of discourse of mass clemency for prisoners cases of drug users/addicts has legal and sociological shortcomings in every dimension. And the researchers recommended that the government, including: Rejuvenation of the Narcotics Law Revision; Strengthening the position of government in Indonesian law enforcement policy; Optimization and expansion of the tasks of the Integrated Assessment Team; Mental revolution dan law-enforcement integrity; and Utilization military basecamps as a rehabilitation site.

Keywords: *Policy Design; Mass Clemency; Drug User/Addict Prisoners.*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta

Sri Turatmiyah, Putu Samawati, Sri Handayani1, Efka Firsta

Ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berkaitan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta menimbulkan banyak penafsiran dalam prakteknya di lapangan. Pengaturan ini sangat penting untuk dianalisis terkait bagaimana implementasi pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta serta implikasi hukumnya. Penelitian normative ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Hasil penelitian bahwa pembubuhan sidik jari jempol kanan, jempol kiri dan sepuluh jari langsung ditempel di atas tanda tangan penghadap, ditempel di lembar kertas terpisah, serta langsung dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta. Kesimpulan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN belum ada kesamaan pendapat di kalangan notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) berupa peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan secara tidak hormat. Kepastian hukum pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tepatnya jempol kanan atau kiri dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta sebagai perlindungan hukum pihak notaris. Peneliti merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk membuat regulasi berupa Kepmenkumham terkait mekanisme kewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.

Kata Kunci: Urgensi Sidik Jari; Perlindungan Hukum; Notaris.

Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif *(Passive Vote Buying)* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej

Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (pembelian suara pasif) tidak. Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana atas ketiadaan aturan tersebut. Dengan mengingat bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis dipergunakan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologis-rasional-doktriner di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan pembelian suara aktif dan pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang *(ius constituendum).*

Kata Kunci: Politik Uang; Penyuapan Pemilu; Tindak Pidana Pemilu.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian

Jamaruli Manihuruk

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah memberikan seluas-luasnya akses bagi orang asing untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Kebijakan ini jelas menguntungkan dari segi pariwisata, tetapi di sisi yang lain, menimbulkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan negara seperti tingginya angka pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Oleh karena itu, berdasarkan fungsi yang diembannya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh Ditjen Imigrasi adalah dengan melibatkan peran penjamin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bermaksud menguraikan permasalahan dan juga memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yaitu dengan memberikan peran yang optimal kepada penjamin. Penjamin yang dimaksud yaitu Biro Perjalanan Wisata. Solusi ini pada prinsipnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian serta peraturan turunannya. Apabila pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan tersebut, maka pemerintah pun akan terbantu dalam pengawasan Orang Asing. Selain itu, untuk mendongkrak daya jual pariwisata daerah di Indonesia, Penjamin dapat menyediakan paket perjalanan khusus daerah tertentu yang dapat dipilih oleh wisatawan mancanegara. Sekali dayung dua pulau terlampaui, tidak hanya mendongkrak daya jual pariwisata daerah, kebijakan ini pun tentu akan memudahkan dan mengefisienkan proses pengajuan bebas visa kunjungan oleh biro perjalanan wisata.

Kata Kunci: Bebas Visa Kunjungan; Penjamin; Biro Perjalanan Wisata; Pengawasan Keimigrasian.

Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Studi Kasus di Lapas "X"

Cynthia Ayu Windani, Renisa Tandyasraya

Permasalahan keamanan dan ketertiban (Kamtib) di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Lapas "X" menjadi salah satu kekhawatiran besar. Konflik antar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), *overcrowding*, dan peningkatan gangguan kamtib adalah isu serius yang memerlukan perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan strategi kamtib, dengan menggunakan Lapas "X" sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi langsung di lembaga pemasyarakatan dan wawancara dengan narasumber kunci. Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan solusi praktis dalam meningkatkan keamanan dan menjaga ketertiban di sistem pemasyarakatan. Dengan mengungkapkan tantangan khusus yang dihadapi oleh Lapas "X", penelitian ini menyumbang kontribusi terhadap upaya peningkatan operasional kamtib di lembaga pemasyarakatan dengan *Prison Incident Management* (PIM) oleh PBB sebagai acuan. Temuan penelitian diharapkan dapat membimbing penelitian masa depan dan memperdalam pemahaman terkait langkah-langkah keamanan yang efektif. Selain itu, penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Ditjenpas untuk meningkatkan dukungannya terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Gangguan Kamtib di Lapas; Keamanan dan Ketertiban Lapas; Konflik Antar Narapidana; Manajemen Insiden Penjara Berdasarkan *Handbook* PBB; Pencegahan Konflik.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Nuzulia Kumala Sari, Galuh Puspaningrum, Saudatus Zahro

Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.

Kata Kunci: Paten; Penghapusan; Surat Edaran.

Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal Bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Yoga Dwi Putra Permana, Ima Mayasari

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma *post posivitisme* dengan studi kepustakaan/ literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan *basecamp* militer sebagai tempat rehabilitasi.

Kata Kunci: Desain Kebijakan; Grasi Massal; Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkoba.